

LAPORAN KINERJA

PREPARED BY
**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,
ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA**

20
22

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana (SDMOT) Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Biro SDMOT sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, kepada *stakeholders*.

Laporan Kinerja Biro SDMOT Tahun 2022 ini berisikan informasi mengenai capaian kinerja dari Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro SDMOT Tahun 2022. Laporan disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, untuk kemudian diperoleh gambaran capaian kinerja Biro SDMOT dalam penyelenggaraan *good governance* di Sekretariat Kabinet.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro SDMOT terus melakukan berbagai upaya perbaikan kinerja agar dapat memberikan hasil yang lebih baik setiap tahunnya. Kedepan, Laporan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pejabat/pegawai di lingkungan Biro SDMOT dan seluruh *stakeholders* dalam menganalisis permasalahan di bidang sumber daya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan. Sehingga dengan demikian, program dan kegiatan pada tahun mendatang dapat disusun dengan lebih tepat sasaran, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana



Henny Navilah

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	5
1.5. Sistematika Laporan	8
 BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perencanaan Kinerja	11
 BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Kinerja	14
3.2. Analisis Penggunaan Sumber Daya	34
 BAB IV	
PENUTUP	35
 LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. PK Biro SDM OT Tahun 2021.....	12
Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	18
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	19
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 ..	20
Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	27
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 ..	28
Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4	32
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Biro SDM OT Tahun 2022	33

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1.1. Struktur Organisasi Biro SDM OT Tahun 2022	5
Grafik 2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Biro SDM OT Tahun 2022	10
Grafik 3.1. Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian	22
Grafik 3.2. Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP	24
Grafik 3.3. Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai	26
Grafik 3.4. Diagram Profil Pegawai di Lingkungan Biro SDM OT	34

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana (SDM OT) Tahun 2022 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro SDM OT Tahun 2022. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sepanjang tahun 2022, akan menjadi dasar rencana tindak lanjut guna meningkatkan kinerja unit kerja pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Biro SDM OT Tahun 2022 adalah sebesar 83,03% (Memuaskan). Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian dari total 3 (tiga) sasaran kegiatan Biro SDM OT, yang diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja dan 1 indikator tambahan yaitu Indeks Sistem Merit.

Berikut intisari capaian kinerja Biro SDM OT Tahun 2022:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	125%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	105,71%
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	101,17%
TOTAL RATA-RATA		110,63%

Dalam proses pencapaian target, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kinerja mulai dari melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja, mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi dalam berbagai proses bisnis, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pegawai, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kelembagaan, ketatalaksanaan, hingga pengelolaan dalam pemberian dukungan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama/Madya. Selain itu, Biro SDM OT juga

menyebarkan survei sebagai bentuk asesmen, guna mengukur kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang diberikan Biro SDM OT sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, dapat disimpulkan seluruh kegiatan Biro SDM OT berhasil terlaksana dengan baik dan melebihi target. Hal itu dikarenakan, meningkatnya kinerja Biro SDM OT setelah masa pandemi dan perubahan pengelolaan kinerja yang lebih adaptif. Namun, Biro SDM OT tetap berkomitmen untuk mempertahankan nilai yang sudah baik dan meningkatkan hal-hal yang dapat diperbaiki kedepannya.

Secara umum target kinerja Biro SDM OT yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Biro SDM OT berkomitmen untuk senantiasa melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja dan merespon tantangan zaman, diantaranya:

- 1) Optimalisasi teknologi dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian;
- 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan;
- 3) Penguatan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya kepada Tim Penilai Akhir.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara dimulai dari pejabat Eselon II ke atas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis. Pertanggungjawaban tersebut juga merupakan salah satu upaya perwujudan penyelenggaraan *Good Governance*.

Pertanggungjawaban dimaksud dituangkan dalam bentuk laporan yang disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan Unit Organisasi/Menteri/Pimpinan Lembaga, untuk selanjutnya laporan kinerja akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga yang telah disusun disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang pada akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana (SDM OT) Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Biro SDM OT sebagai entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja (Eselon II) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro SDM OT dalam tahun mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka kedudukan Biro SDM OT adalah sebagai berikut:

1.2.1. Kedudukan

Biro SDM OT adalah unit kerja yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Administrasi.

1.2.2. Tugas

Biro SDM OT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir, penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

1.2.3. Fungsi

Biro SDM OT menyelenggarakan fungsi:

- a) perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b) pengolahan data dan informasi kepegawaian;
- c) penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

- d) pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
- e) penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f) perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g) pembinaan dan perlindungan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h) pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi

1.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Biro SDM OT membawahi 4 (empat) Bagian yaitu:

a) Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya, pengolahan data dan informasi kepegawaian, penelitian, penyiapan, dan penyelesaian administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penyiapan dan pelaksanaan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Informasi Pegawai;
- 2) Subbagian Mutasi, Kepangkatan, dan Pensiun; dan
- 3) Subbagian Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai.

b) Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai

Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kapasitas pegawai, dan kerja sama dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dan pegawai lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- 1) Subbagian Perencanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- 2) Subbagian Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai; dan
- 3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas Pegawai.

c) Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai

Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan permasalahan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, pelaksanaan konseling pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penyelenggaraan administrasi pembinaan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- 1) Subbagian Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Subbagian Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Non Pegawai Negeri Sipil; dan
- 3) Subbagian Administrasi Pembinaan dan Konsultasi Pegawai.

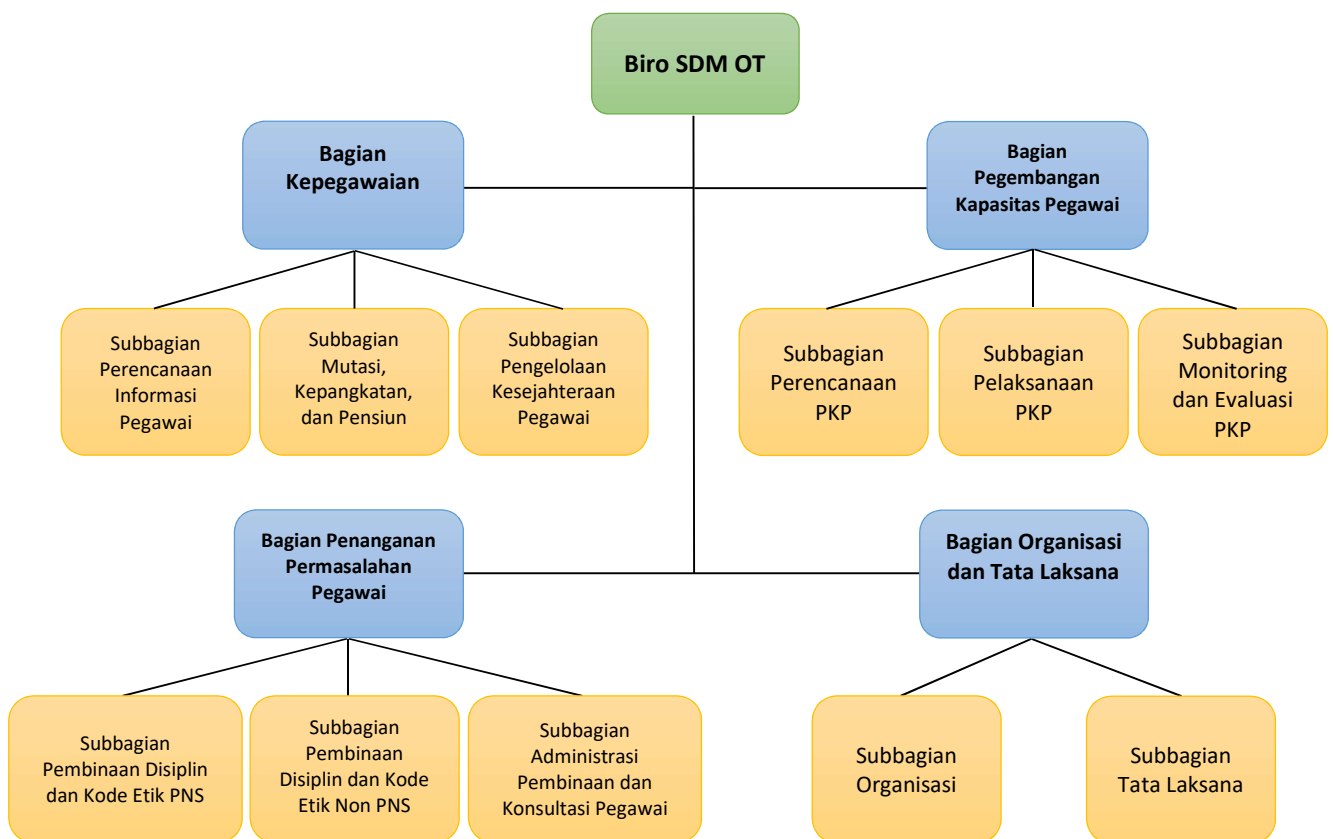
d) Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan peraturan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana dibantu oleh 2 (dua) Subbagian, yaitu:

- 1) Subbagian Organisasi;
- 2) Subbagian Tata Laksana.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berikut gambaran struktur organisasi Biro SDM OT:



Grafik 1.1. Struktur Organisasi Biro SDM OT Tahun 2022

1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Arah kebijakan Biro SDM OT dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas, dan fungsi Sekretariat Kabinet yaitu mengoptimalkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana di Lingkungan

Sekretariat Kabinet. Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut, peran strategis Biro SDM OT adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
- b) Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Berkualitas.

Dalam menentukan kekuatan maupun kelemahan serta permasalahan yang dihadapi sebuah organisasi, diperlukan analisis eksternal dan internal. Hasil analisis tersebut bersama dengan arahan strategis organisasi digunakan untuk menetapkan sasaran, perumusan strategis, dan implementasinya.

a) Kekuatan

- 1) Memiliki struktur organisasi serta tugas dan fungsi yang jelas;
- 2) Tersedianya jumlah sumber daya manusia yang memadai; dan
- 3) Komitmen pejabat dan pegawai dalam mengelola manajemen kepegawaian.

b) Kelemahan

- 1) Sistem Informasi Kepegawaian yang belum terintegrasi;
- 2) Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal; dan
- 3) Sistem Informasi yang ada belum menunjang proses bisnis pelayanan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

c) Peluang

- 1) Tersedianya kesempatan mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah yang lain untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Sekretariat Kabinet;
- 2) Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini, termasuk di bidang sumber daya manusia; dan
- 3) Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak dan kementerian/lembaga lainnya.

d) Ancaman

- 1) Masih adanya kondisi pandemi COVID-19 berpotensi menghambat kecepatan dan kelancaran proses bisnis;
- 2) Sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan profesional pada instansi pemerintah lainnya;
- 3) Adanya kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan dapat diukur pada instansi pemerintah lainnya dengan *core* yang sama.

Berdasarkan potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini maupun kemungkinan yang akan datang, meliputi:

a) Aspek Kelembagaan

Perubahan struktur organisasi yang cenderung dinamis berpotensi memperlambat proses adaptasi kerja.

b) Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antara pejabat/pegawai di lingkungan Biro SDM OT serta dengan unit kerja lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Biro.

c) Aspek Sumber Daya Manusia

Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di Biro SDM OT perlu ditingkatkan guna menghadapi tuntutan dan beban kerja yang semakin besar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan proyeksi Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

d) Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yang telah ada belum saling terintegrasi dan masih dalam proses pengembangan sehingga belum dapat dipergunakan secara optimal.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LKj Biro SDM OT Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LKj tahun 2022, kedudukan Biro SDM OT dalam Sekretariat Kabinet beserta struktur organisasinya, serta aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan rencana strategis dan ikhtisar perjanjian kinerja Biro SDM OT.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis atas capaian kinerja Biro SDM OT yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi, yang ditunjang dengan penyajian hasil pengukuran kinerja serta akuntabilitas keuangan.

BAB IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Biro SDM OT Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Arah kebijakan Sekretariat Kabinet sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yaitu memberikan dukungan pengelolaan manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengacu pada arah kebijakan Sekretariat Kabinet tersebut, arah kebijakan Biro SDM OT adalah:

Mengoptimalkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet

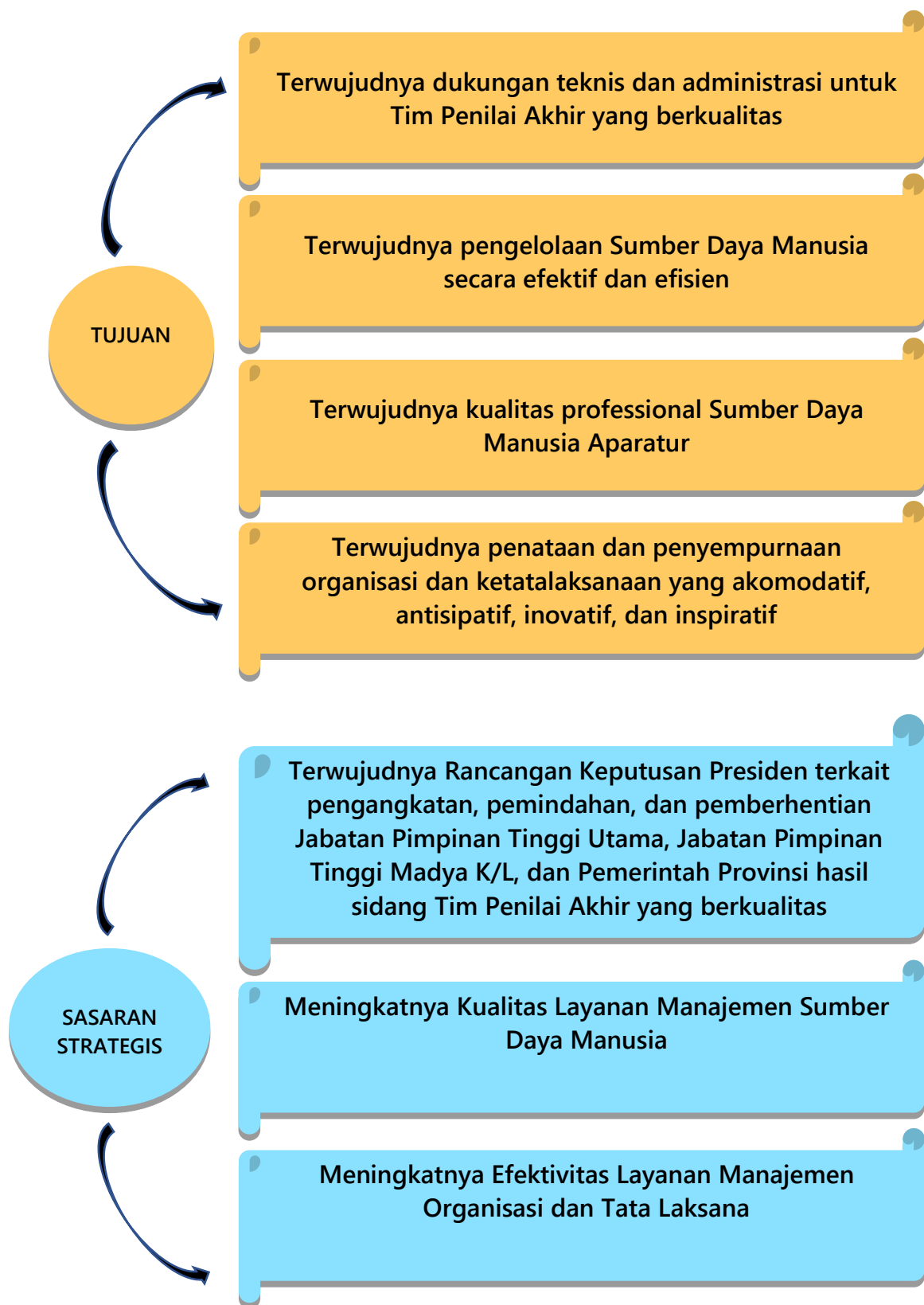
Biro SDM OT sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi organisasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Oleh sebab itu, pada prinsipnya Biro SDM OT memiliki visi dan misi yang **selaras** dengan Sekretariat Kabinet. Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro SDM OT adalah sebagai berikut

VISI

Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan kelembagaan yang efektif di lingkungan Sekretariat Kabinet secara profesional

MISI

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Grafik 2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Biro SDM OT Tahun 2022

Penjelasan di atas pada prinsipnya menggambarkan arah organisasi secara berjenjang. Dimulai dari menetapkan visi, untuk selanjutnya visi tersebut dituangkan menjadi misi, menetapkan tujuan, dan menetapkan sasaran kegiatan yang lebih spesifik dan terfokus. Setelah menetapkan sasaran kegiatan, langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja diperlukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan secara terukur dan dapat dicapai.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sangat penting karena dapat menjadi pertimbangan dalam:

- a) Meningkatkan probabilitas keberhasilan pencapaian rencana jangka panjang unit kerja, karena keberhasilan unit kerja berkontribusi dalam keberhasilan tujuan organisasi;
- b) Meletakkan dasar yang kuat untuk melaksanakan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi; dan
- c) Memicu kesadaran dan tanggung jawab seluruh unsur penyelenggara organisasi untuk memberikan performa yang baik dalam rangka pemenuhan capaian kinerja organisasi.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/unit kerja dalam rentang kurun waktu satu tahun. Perjanjian tersebut merepresentasikan komitmen dan janji yang jelas dan terukur, sehingga akan mendorong pengembalian tanggung jawab untuk senantiasa meningkatkan kinerja satuan yang dipimpinnya. PK juga berfungsi sebagai medium penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, serta sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

Sasaran kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Pencapaian sasaran dapat mengarahkan pada kegiatan yang spesifik dan terfokus, sehingga memudahkan pengalokasian sumber-sumber

daya yang diperlukan. Guna mencapai sasaran kegiatan dimaksud, diperlukan indikator kinerja yang terukur dan dapat dicapai.

Biro SDM OT telah menyusun PK sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan kinerja yang diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholders* pada tahun 2022. PK Biro SDM OT dimaksud terdiri dari sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	80%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	75%
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%
		Indeks Sistem Merit	Baik (297)
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%
		Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80%
		Persentase kepuasan terhadap bantuan layanan hukum	70%
4	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	C (9-12 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran	90%

Tabel 2.1 | PK Biro SDM OT Tahun 2022

Pada prinsipnya, PK dapat dilihat sebagai instrumen yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya. Adanya PK juga dapat membangun motivasi bekerja dengan orientasi *outcome*, mengingat hal ini diperlukan guna mencapai sasaran kegiatan dan tujuan di unit kerja dan level Eselon masing-masing. Keberhasilan tersebut akan turut berdampak pada keberhasilan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Penjabaran lebih lanjut mengenai capaian kinerja Biro SDM OT atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan akan dijelaskan pada BAB selanjutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Biro SDM OT merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan. Kinerja Biro SDM OT dibangun melalui komitmen terhadap pemenuhan target kinerja yang diperjanjikan di awal tahun serta upaya menindaklanjuti rekomendasi baik dari hasil evaluasi pihak internal maupun eksternal. Upaya pemenuhan target kinerja dimaksud serta tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja akan menelurkan suatu hasil yang disebut dengan capaian kinerja

Gambaran mengenai capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran yang sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas unit kerja dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepada unit kerja tersebut. Pengukuran digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan indikator kinerja berdasarkan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat keberhasilan pada indikator kinerja menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro SDM OT dengan realisasinya. Pengukuran capaian kinerja Biro SDM OT Tahun 2022 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	Penggolongan Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan	Biru
2.	85% - 100%	Sangat Baik	Hijau
3.	70% - 85%	Baik	Oranye
4.	55% - 70%	Cukup	Kuning
5.	<55 %	Kurang Baik	Merah

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

Berikut adalah capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan di dalam PK:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	100%	125%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	75%	83.04%	110.72%

	Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%	80.00%	100.00%
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%	81.07%	101.34%
		Indeks Sistem Merit	297	329	110.77%
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%	72.92%	91.15%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%	77.57%	96.96%
		Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	80.61%	100.76%
		Persentase kepuasan terhadap bantuan layanan hukum	70%	81.07%	115.81%
4	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	C (9-12 kali revisi)	7	B
		Persentase penyerapan anggaran	90%	98.24%	109.16%

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, berdasarkan perbandingan antara tingkat realisasi dengan target, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar capaian pada beberapa indikator kinerja telah tercapai secara optimal (melebihi target), namun masih terdapat capaian pada indikator kinerja yang belum mencapai target minimum yang ditetapkan.

Uraian rinci mengenai capaian kinerja Biro SDM OT Tahun 2022, dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2020, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir. Fungsi tersebut diejawantahkan ke dalam sasaran kegiatan berupa *“terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas”*.

Sasaran kegiatan dimaksud mempunyai indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi	80%	100%	125%	Memuaskan

hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu				
---	--	--	--	--

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, terdapat 168 (seratus enam puluh delapan) Keppres yang diselesaikan tepat waktu dan seluruhnya disampaikan kepada Presiden. Dengan kata lain, realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 100%. Hasil penghitungan menggambarkan pencapaian kinerja berupa Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu tergolong kategori Memuaskan.

3.1.2. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia

Sasaran tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet, antara lain meliputi kegiatan:

- a) Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai lainnya;
- b) Penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;

- c) Penatausahaan pensiunan dan kenaikan pangkat;
- d) Penyelesaian administrasi penggajian dan kesejahteraan;
- e) Pelayanan absensi, cuti, surat keterangan, dan Sistem Informasi Pegawai;
- f) Pelayanan tanda pengenal pegawai, asuransi kesehatan, dan administrasi lainnya;
- g) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- h) Pemberian beasiswa;
- i) Pelaksanaan magang;
- j) Pembinaan ASN dan pegawai lain di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- k) Penyelesaian permasalahan pegawai;
- l) Penegakan kode etik dan disiplin pegawai; dan
- m) Penyelesaian Administrasi terkait Permohonan Izin ke Luar Negeri;

Uraian mengenai capaian atas sasaran dimaksud sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
1	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	75%	83.04%	110.72%	Memuaskan
2	Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%	80.00%	100.00%	Memuaskan
3	Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%	81.07%	101.34%	Memuaskan
4	Indeks Sistem Merit	297	329	110.77%	Memuaskan

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut dilakukan melalui survei, dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner secara *online* yang diselenggarakan oleh Biro SDMOT pada tanggal 1 s.d. 31 Januari 2023. Responden survei adalah perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terdiri dari 4 (empat) level pejabat

struktural meliputi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan 1 (satu) orang pelaksana. Pada realisasinya, terdapat 107 (seratus tujuh) responden yang mengisi survei tersebut. Adapun hasil survei menunjukkan pencapaian kinerja terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen SDM tergolong kategori Memuaskan.

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2022 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya:

Tahun	Target	Realisasi		Capaian		Kategori Pencapaian Kinerja
		PK 1	PK 2	PK 1	PK 2	
Persentase kepuasan layanan kepegawaian						
2019	70%	76,24%		108,91%		Memuaskan
2020	70%	79,25%		113,21%		Memuaskan
2021	70%	81.05%		115.78%		Memuaskan
2022	75%	83.04%		110.72%		Memuaskan
Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai						
2019	80%	72,48%		90,60%		Sangat Baik
2020	80%	75,17%	74,05%	93,96%	92,56%	Sangat Baik
2021	80%	73.30%		91.63%		Sangat Baik
2022	80%	80.00%		100.00%		Sangat Baik
Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai						
2019	80%	77,30%		96,62%		Sangat Baik
2020	80%	78,10%	77,25%	97,62%	96,56%	Sangat Baik
2021	80%	77.54%		96.93%		Sangat Baik
2022	80%	81.07%		101.34%		Memuaskan

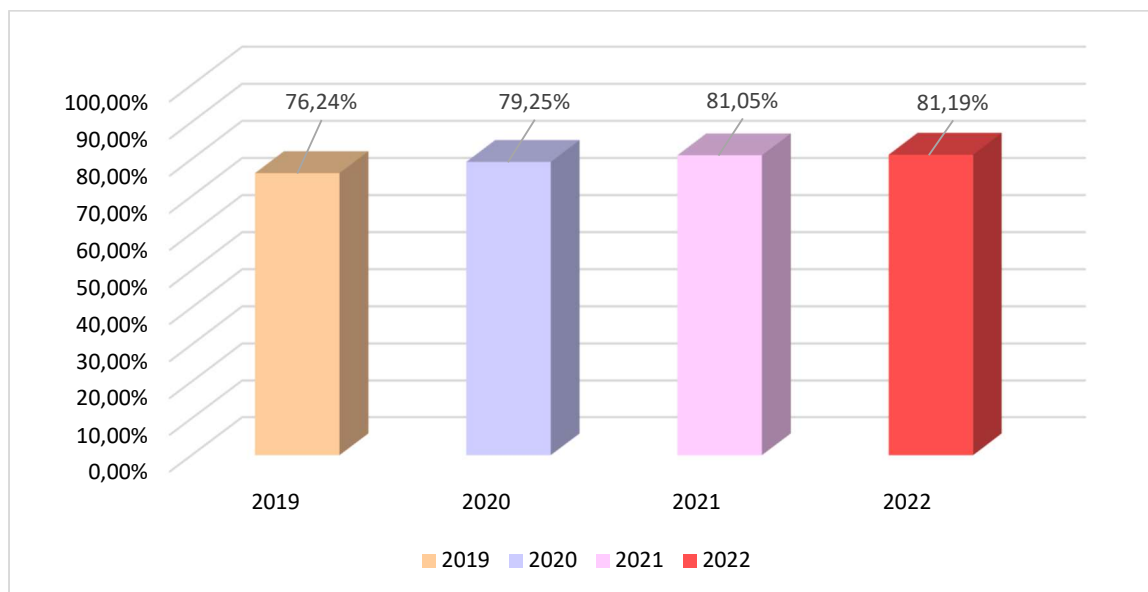
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

1) Persentase kepuasan layanan kepegawaian

Berikut daftar pertanyaan pada survei mengukur kepuasan Layanan Kepegawaian diantaranya:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
2. Penyelesaian Administrasi Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Laporan Perkawinan, Laporan Penambahan Anak, Kartu Tanda Pengenal, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Kecelakaan Kerja;
3. Penyelesaian Administrasi terkait Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai, Pelaksanaan Pelantikan, pensiun serta kenaikan pangkat;
4. Penyelesaian Hak Keuangan (Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Keluarga, Uang Makan, Uang Lembur, Uang Makan Lembur); dan
5. Pelayanan Absensi (Kehadiran, Cuti, Surat Keterangan).

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, indeks kepuasan *stakeholder* terhadap layanan kepegawaian cenderung mengalami fluktuasi, namun tidak ekstrim. Pada tahun 2019 angka indeks kepuasan sebesar 76,24%, kemudian pada tahun 2020 lalu indeks kepuasan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan, naik menjadi sebesar 79,25%, dilanjutkan dengan peningkatan pada tahun 2021 sebesar 81.05% dan tahun 2022 sebesar 81.19%. Berdasarkan hasil tersebut telah mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja (sebesar 80%). Gambaran mengenai perbandingan indeks kepuasan layanan kepegawaian dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.1 Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian

Hasil yang sudah baik tersebut tetap akan dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kinerja Biro SDM OT semakin baik dan dapat bermanfaat secara riil bagi para pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam meningkatkan kinerja Biro SDM OT, beberapa langkah yang perlu dilakukan diantaranya:

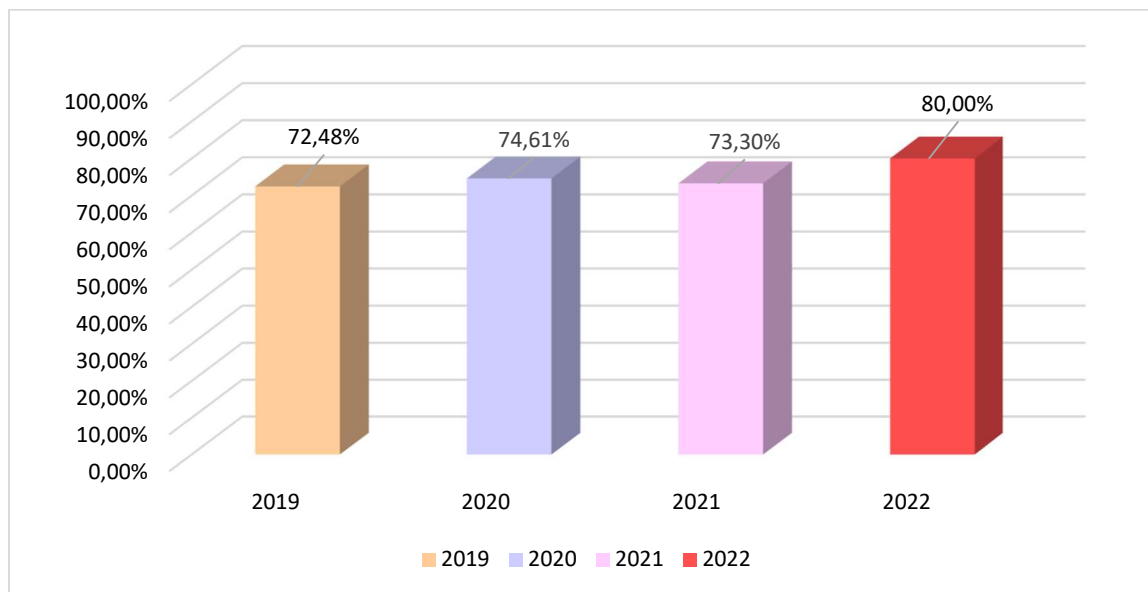
1. Penguatan koordinasi seluruh pegawai di lingkungan Biro SDMOT dalam pembaruan data-data dan informasi terkait kepegawaian;
2. Optimalisasi sistem teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet;
3. Pengintegrasian data kepegawaian;
4. Peningkatan kualitas dan pembaruan layanan Biro SDMOT; dan
5. Penguatan monitoring dan evaluasi layanan kepegawaian oleh Biro SDMOT antara lain melalui penambahan Standar Operasional Prosedur (SOP).

2) Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai

Berikut daftar pertanyaan pada survei mengukur kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai diantaranya:

1. Penyelenggaraan Program Pengembangan Kapasitas Pegawai (Diklat, Seminar, Workshop, Webinar, dan lain-lain);
2. Program Pengembangan Kompetensi Pegawai sesuai kebutuhan (berdasarkan kalender diklat yang disusun sesuai usulan dari setiap Unit Kerja dan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran);
3. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi Pegawai (kuesioner pasca pelaksanaan) dengan laporan yang telah disampaikan ke setiap Unit Kerja;
4. Pelayanan Administrasi Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Pemberian Beasiswa; dan
5. Pengelolaan Peserta Magang.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai memiliki trend peningkatan yang cenderung stabil, dalam kategori Sangat Baik. Pada tahun 2019 angka indeks kepuasan sebesar 72,48%, lalu pada tahun 2020 kembali meningkat dengan indeks kepuasan berdasarkan PK 1 sebesar 75,17% dan berdasarkan PK 2 sebesar 74,05%, namun pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 73.30%. Pada tahun 2022, angka indeks kepuasan mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebesar 80% atau memiliki capaian 100%. Gambaran mengenai perbandingan indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.2 Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP

Berdasarkan grafik tersebut, indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1.87% karena masih terfokusnya pada Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada anggaran. Namun, terlihat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 6.7% dan berhasil mencapai target 80%. Hal itu berkaitan dengan telah mulai dibuka kesempatan pengembangan secara tatap muka, dan inovasi baru seperti penyelenggaraan Bestie (Bulan E-Seminar Topik dan Isu Terkini) dan pengembangan mandiri yang menambah *experience* baru terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Berdasarkan nilai rata-rata kepuasan terhadap pelaksanaan program PKP, meskipun telah mencapai target 80%, Biro SDMOT masih perlu terus meningkatkan kualitas program pengembangan kapasitas pegawai agar bisa mendapatkan kategori Memuaskan, baik dari sisi substansi program maupun teknis penyelenggaraan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menyelenggarakan program PKP sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi masing-masing pegawai (tepat sasaran),

- sehingga setiap pegawai yang mengikuti program tersebut dapat merasakan manfaatnya untuk peningkatan kinerja;
2. Merencanakan dan melaksanakan program PKP dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan media pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi;
 3. Merencanakan dan melaksanakan program PKP non klasikal bentuk lain untuk menjangkau lebih banyak peserta program;
 4. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat khususnya terkait pemanfaatan Diklat secara berkala;
 5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien;
 6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program PKP;
 7. Menyediakan informasi atau kesempatan beasiswa yang lebih luas kepada pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 8. Menindaklanjuti proses permohonan izin belajar secara cepat dan akurat.

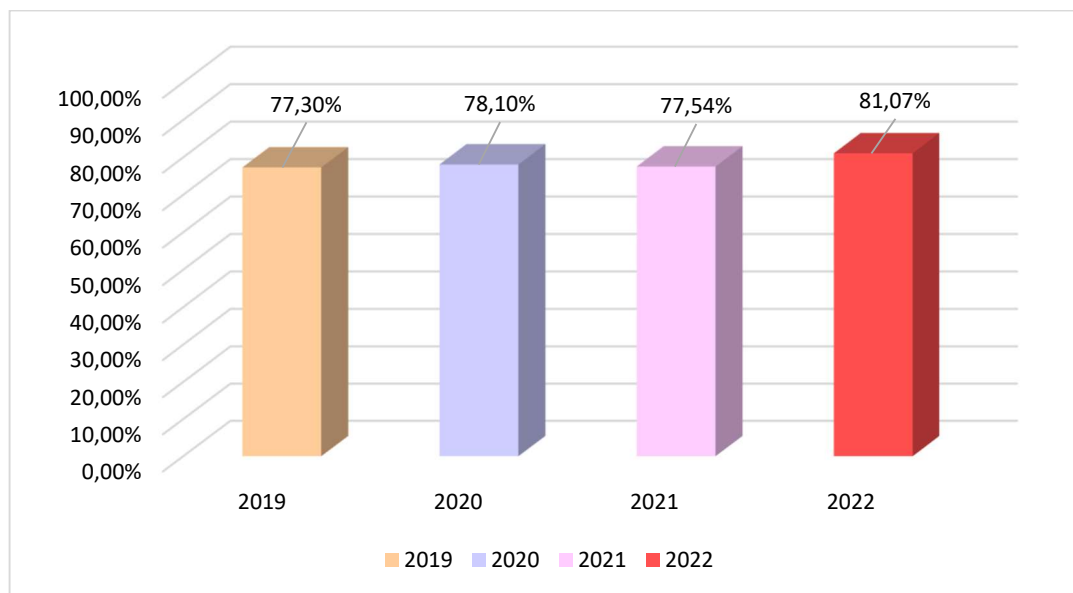
3) Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai

Berikut daftar pertanyaan pada survey mengukur layanan pembinaan pegawai diantaranya:

1. Pembinaan Disiplin dan Kode Etik PNS;
2. Penanganan Permasalahan PNS;
3. Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Non PNS (termasuk PTT);
4. Penanganan Permasalahan Non PNS (termasuk PTT);
5. Pelaksanaan Layanan Konseling Pegawai;
6. Pelaksanaan Pendampingan Hukum;
7. Pelayanan Administrasi Penghargaan Tanda Jasa/Kehormatan; dan
8. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, indeks kepuasan layanan pembinaan pegawai cenderung stabil. Pada tahun 2019 angka indeks

kepuasan sebesar 77,30%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan indeks kepuasan berdasarkan PK 1 sebesar 78,10% dan berdasarkan PK 2 sebesar 77,25%, %, namun pada tahun 2021 sedikit penurunan menjadi sebesar 77,54%. Selanjutnya, pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga melampaui target, yaitu sebesar 81,01%. Gambaran mengenai perbandingan indeks kepuasan peserta terhadap layanan pembinaan pegawai dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.3 Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai

Berdasarkan grafik tersebut, indeks kepuasan layanan pembinaan pegawai pada tahun 2022 mengalami peningkatan kepuasan yang cukup signifikan. Hal itu didukung dengan adanya inovasi yang telah dilakukan, yaitu adanya Pojok Konseling dengan bantuan Psikolog Ahli dan Setkab Siap sebagai pelayanan satu pintu. Namun demikian, meskipun telah melampaui target, Biro SDM OT seyogyanya tetap perlu terus mempertahankan dan meningkatkan performa layanan pembinaan pegawai. Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Melakukan upaya penanganan permasalahan pegawai secara terintegrasi, dari sisi preventif (berorientasi pemberdayaan serta pengembangan) dan dari sisi kuratif (pemberian keputusan yang tepat bagi penyelesaian masalah pegawai);

2. Menyelenggarakan kegiatan yang mengangkat isu-isu terkait permasalahan di lingkungan kerja;
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk lebih memudahkan komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh Pegawai;
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka menyelesaikan administrasi izin pegawai ke luar negeri; dan
5. Optimalisasi *database* pengusulan dan pemberian tanda kehormatan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3.1.3 Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana

Sasaran ini diwujudkan dalam bentuk penyusunan peraturan Internal (Peraturan dan Keputusan Sekretaris Kabinet serta Peraturan dan Keputusan Deputi Bidang Administrasi di bidang organisasi dan tata laksana), penyusunan kajian terkait organisasi dan tata laksana serta pemberian bantuan layanan hukum. Uraian mengenai capaian atas sasaran dimaksud sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
1	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%	72.92%	91.15%	Sangat Baik
2	Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%	77.57%	96.96%	Sangat Baik
3	Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	80.61%	100.76%	Memuaskan
4	Persentase kepuasan terhadap bantuan layanan hukum	70%	81.07%	115.81%	Memuaskan

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut dilakukan melalui beberapa jenis survei, dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Responden survei merupakan perwakilan pejabat/pegawai dari masing-masing unit kerja serta eselon di lingkungan Sekretariat Kabinet. Berdasarkan hasil survei menunjukkan pencapaian kinerja semuanya tergolong kategori Memuaskan. Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2022 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan				
2019	80%	61,44%	76,80%	Baik
2020	80%	61,44%	76,80%	Baik
2021	80%	72,92%	91,15%	Sangat Baik
2022	80%	72,92%	91,15%	Sangat Baik
Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana				
2019	80%	86,67%	108,33%	Memuaskan
2020	80%	86,67%	108,33%	Memuaskan
2021	80%	90%	112,5%	Memuaskan
2022	80%	77,57%	96,96%	Sangat Baik
Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu				
2021	80%	74.58%	93.2%	Sangat Baik
2022	80%	80,61%	100,76%	Memuaskan
Persentase kepuasan terhadap bantuan layanan hukum				
2021	70%	76.50%	109.28%	Memuaskan
2022	70%	81,07%	115,81%	Memuaskan

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

1) Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan

Capaian indikator kinerja efektivitas kelembagaan tahun 2022 diperoleh dari hasil Laporan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dimana aspek-aspek yang dievaluasi meliputi indikator-indikator yang terkandung di dalam masing-masing dimensi dan subdimensi.

Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut dilakukan melalui survei, dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner secara *online*, dimana responden survei ini adalah Pimpinan Unit Kerja (Eselon II) dan 1 (satu) orang perwakilan Pejabat Eselon III di masing-masing unit kerja dengan total sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 72.92% dimana angka ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari beberapa tahun sebelumnya, namun hasil yang diperoleh tersebut belum mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja (sebesar 80%). Dari angka selisih tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Selain itu, subdimensi dengan nilai tertinggi adalah Teknologi Informasi sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga setiap penyelenggaraan tugas dan fungsi telah ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Oleh sebab itu, Biro SDM OT seyogyanya tetap perlu terus meningkatkan kinerja organisasi kedepannya dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi, kontrol dan komunikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
2. Peraturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan perlu disosialisasikan secara optimal;

3. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet perlu berjalan beriringan dengan penguatan budaya kerja dengan metode *paperless*.

2) Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana

Berdasarkan dari hasil evaluasi SOP didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi SOP di lingkungan Sekretariat Kabinet mendapatkan hasil di atas rata-rata minimal standar manajemen tata laksana, yaitu mencapai 84,3%. Secara keseluruhan sebanyak 90% untuk pemenuhan SOP, 91,67% untuk substansi SOP dan 72,5% untuk penerapan SOP dari total 70 responden di setiap unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Kabinet.
2. Evaluasi SOP secara umum menunjukkan hasil baik di atas standar minimal sebesar 80%, yaitu mencapai angka persentase 84,3%. Namun sisanya memberi tanggapan bahwa SOP yang sudah ada perlu dilakukan evaluasi kembali dan diselaraskan dengan SOTK Perseskab terbaru sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan efektifitas kinerja dari masing-masing pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang didapat dalam proses evaluasi SOP di lingkungan Sekretariat Kabinet, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan untuk diterapkan dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal melalui SOP, yakni:

1. Perlu penyempurnaan terhadap beberapa SOP yang telah ada di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai dengan SOTK terbaru guna meningkatkan kinerja baik kinerja individu maupun kinerja organisasi.
2. Peningkatan sisi pemenuhan SOP di lingkup unit kerja Sekretariat Kabinet, yang ditunjang dengan kualitas substansi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip SOP, sehingga dapat diterapkan secara optimal di organisasi.

3. Perlu diadakan sosialisasi dan evaluasi berkala pada tiap unit kerja untuk memastikan dan menyelaraskan pendapat antara unit kerja dengan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana.

3) Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu

Penghitungan capaian indikator kinerja produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu dilakukan melalui survei, dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner secara *online* dan target responden yang sama dengan mengukur capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan manajemen sumber daya manusia. Berikut daftar pertanyaan pada survei mengukur produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu diantaranya:

1. Penataan dan Pembentukan Peraturan Internal
2. Sosialisasi Peraturan Internal (memorandum, JDIH Setkab, dsb)
3. Kebijakan Persiapan Peralihan JF dan Pembentukan JF baru

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai rata-rata sebesar 80,61%, yang artinya Biro SDMOT telah melampaui target pada Perjanjian Kinerja (target 80%). Selanjutnya, Biro SDM OT tetap perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja penyelesaian produk hukum sesuai skala prioritas sehingga dapat terselesaikan secara tepat waktu.

4) Persentase kepuasan terhadap bantuan layanan hukum

Penghitungan capaian indikator kinerja kepuasan terhadap bantuan layanan hukum merupakan pertama kali dilakukan melalui survei, dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner secara *online* dan target responden yang sama dengan mengukur capaian indikator kinerja produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu. Hanya terdapat 1 (satu) pertanyaan pada survey mengukur kinerja kepuasan terhadap bantuan layanan hukum yaitu Pelaksanaan Pendampingan Hukum.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai rata-rata sebesar 81,07%, dimana angka ini telah mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja (sebesar 70%). Oleh sebab itu, Biro SDM OT seyogyanya tetap perlu terus responsif dalam meningkatkan pelayanan

terhadap pendampingan bantuan layanan hukum guna meningkatkan kepuasan untuk tahun berikutnya.

3.1.4 Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang efektif

Sasaran ini merupakan sasaran baru di tahun 2022 yang sebelumnya tidak menjadi sasaran kinerja. Uraian mengenai sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
1	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	C (9-12 kali revisi)	7 kali revisi	B	Memuaskan
2	Presentase penyerapan anggaran	90%	98.24%	109.16%	Memuaskan

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

Biro SDM OT menjalankan program Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet. Program tersebut terdiri dari Layanan Manajemen SDM, Layanan Manajemen Organisasi, dan Tata Laksana. Pagu awal yang diperjanjikan dalam PK Biro SDM OT adalah Rp. 203.129.166.000. Anggaran tersebut menopang kegiatan Biro SDM OT tahun 2022 yang termuat di dalam sasaran kegiatan. Berikut ini tabel alokasi beserta realisasi anggaran per sasaran kegiatan tahun 2022:

Pagu Awal*	Pagu Revisi*	Realisasi*	% Realisasi	% Capaian Kinerja*
Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas				
1.851.201.000	1.851.201.000	1.353.213.000	73,10%	81,22%
Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia				
200.889.525.000	188.471.614.000	185.826.125.327	98,60%	109,56%
Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana				
388.440.000	319.234.000	110.739.760	34,69%	38,54%
TOTAL				
203.129.166.000	190.642.049.000	187.290.078.087	98,24%	109,16%

* dalam rupiah

* rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Biro SDM OT Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah anggaran Biro SDM OT setelah revisi pengalihan anggaran menjadi Rp. 190.642.049.000. Sedangkan realisasi/penyerapan anggaran sebesar Rp. 187.290.078.087 atau sama dengan 98,24%, dengan penyerapan pada masing-masing sasaran kegiatan seperti yang dapat dilihat lebih lanjut di dalam tabel. Hasil ini menggambarkan bahwa penyerapan anggaran di Biro SDM OT tersebut sangat baik. Hal ini didukung oleh optimalisasi alokasi anggaran kegiatan yang tidak dapat dipakai akibat dari pandemi COVID-19 untuk kegiatan-kegiatan penanganan pandemi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pengukuran sejauh mana penggunaan anggaran berjalan dengan efektif dan efisien dapat dilihat dari pencapaian target. Sebuah kegiatan dapat disebut efektif apabila kegiatan yang dilaksanakan mampu membuat tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan. Dengan kata lain, efektivitas menitikberatkan pada hasil. Sedangkan efisien adalah kondisi dimana sebuah kegiatan mampu menghasilkan *output*

yang optimal dengan *input* minimum. Dengan kata lain, efisiensi menitikberatkan pada proses.

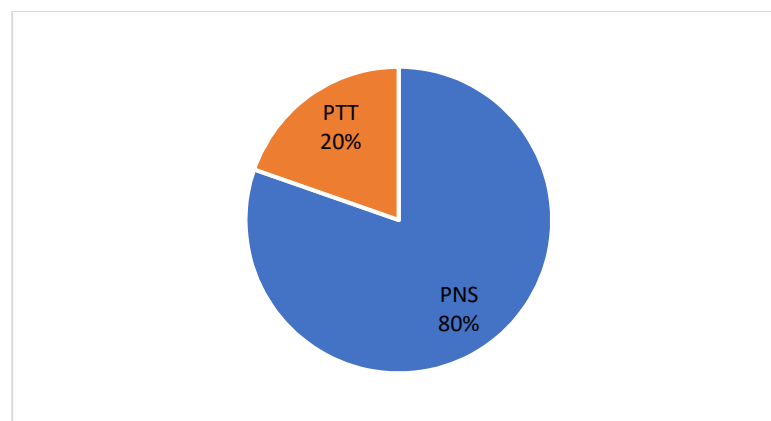
Untuk dapat disimpulkan, penilaian untuk seluruh sasaran kegiatan berdasarkan kategori capaian kinerja memperoleh hasil **Memuaskan** dengan nilai persentase rata-rata kepuasan kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana sebesar **106.17%**

3.2 Analisa Penggunaan Sumber Daya

Analisa ini memberikan gambaran mengenai kondisi sumber daya manusia, dan sarana prasarana di lingkungan Biro SDM OT Tahun 2022. Penjelasan juga menggambarkan bagaimana penggunaan seluruh sumber daya dimaksud dalam mendukung kinerja Biro SDM OT guna mencapai target-target yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2022, Biro SDM OT didukung oleh sebanyak 45 orang, diantaranya 34 orang PNS dan 11 orang PTT.



Grafik 3.4 Diagram Profil Pegawai di Lingkungan Biro SDM OT

Pada tahun 2022, proses pengalihan Jabatan Administrator ke dalam Jabatan Fungsional sebagai bagian dari program prioritas (*Quick Wins*) Sekretariat Kabinet telah dimulai dan prosesnya masih

berlangsung hingga saat ini. Biro SDM OT nantinya akan didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pengalihan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

3.2.3. Sarana Prasarana

Sarana Alat Pengolah Data (APD) yang dimiliki Biro SDM OT sepanjang tahun 2022 sudah cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Biro SDM OT Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas rencana kinerja yang telah ditetapkan. Biro SDM OT senantiasa berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Biro SDM OT Tahun 2022 menjabarkan capaian atas indikator kinerja pada 4 (empat) sasaran kegiatan. Pada prinsipnya keempat sasaran strategis tersebut dapat dicapai bahkan melebihi target.

Sasaran *“Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas”* memperoleh capaian kinerja sebesar 125% (Memuaskan), sasaran *“Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia”* sebesar 105,71% (Memuaskan), sasaran *“Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana”* sebesar 101,16% (Memuaskan), dan sasaran *“Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang efektif”* sebesar 109,16% (Memuaskan).

Meskipun capaian yang diperoleh relatif sudah baik, upaya perbaikan dan peningkatan kinerja harus terus dilakukan. Memperhatikan hasil capaian kinerja dan dalam rangka meningkatkan kinerja Biro SDM OT pada Tahun 2023, saran dan upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Optimalisasi teknologi dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian;
- b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan;
- c) Penguatan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- d) Meningkatkan kualitas pengelolaan pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya kepada Tim Penilai Akhir.

LAMPIRAN

Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja Biro SDM OT Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Penyerapan
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	100%	125%	Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp.1.851.201.000	Rp.1.851.201.000	73,10%

2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	75%	83.04%	110.72%	Dukungan Manajemen	Rp.200.889.525.000	Rp.188.471.614.000	98,60%
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80%	80.00%	100.00%				
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80%	81.07%	101.34%				
		Indeks Sistem Merit	297	329	110.77%				
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80%	72.92%	91.15%		Rp.388.440.000	Rp.319.234.000	43,36%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%	77.57%	96.96%				
		Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	80.61%	100.76%				
		Persentase kepuasan terhadap bantuan layanan hukum	70%	81.07%	115.81%				

Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran Biro SDM OT Tahun 2022

Rincian anggaran yang dipergunakan untuk setiap Komponen RAB:

Kode	Kegiatan/Komponen	Pagu Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran	Persentase Penyerapan
5010	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	188.790.848.000	185.936.865.087	98.44%
EBA.957	Layanan Hukum	28.100.000	22.975.000	81.76%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	319.234.000	110.739.760	34.69%
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	19.700.000	0	0%
EBA.994	Layanan Perkantoran	184.129.123.000	181.790.763.405	98.73%
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	4.294.691.000	4.012.386.922	93.43%
4984.AAE.001	Rancangan Keputusan Presiden terkait Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil siding TPA	1.851.201.000	1.353.213.000	73,10%
TOTAL		190.642.049.000	187.290.078.087	98,24%

Lampiran 4: Penyelesaian Administrasi Dokumen Kepegawaian

No	Uraian	Jumlah
1	Penyelesaian administrasi usulan dokumen Kenaikan Pangkat Periode April 2020	28 Dokumen
2	Penyelesaian administrasi usulan dokumen Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2020	39 Dokumen
3	Penyelesaian administrasi usulan Pensiun PNS	6 Dokumen
4	Penyelesaian administrasi Pelaksanaan Pelantikan	7 Dokumen
5	Penyelesaian administrasi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)	304 Dokumen
6	Penyelesaian administrasi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)	324 Dokumen
7	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Gaji Pokok	14 Dokumen
8	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Tunjangan Kinerja	12 Dokumen
9	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Uang Makan	12 Dokumen
10	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur	12 Dokumen
11	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Hak Keuangan Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden	12 Dokumen
12	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Honorarium Pramubakti dan Pengemudi	12 Dokumen
13	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Pramubakti dan Pengemudi	12 Dokumen
14	Penyelesaian administrasi usulan pembayaran Uang Makan Pramubakti dan Pengemudi	12 Dokumen
15	Penyelesaian administrasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan	434 Dokumen
17	Pemutakhiran database pegawai	12 Dokumen

Lampiran 5: Penyelesaian Keputusan Sekretaris Kabinet

No	Perihal	Nomor	Tanggal Penetapan
1	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 1 Tahun 2021	6 Januari 2021
2	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepseskab Nomor 2 Tahun 2021	14 Januari 2021
3	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepseskab Nomor 4 Tahun 2021	21 Januari 2021
4	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepseskab Nomor 5 Tahun 2021	21 Januari 2021
5	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 13 Tahun 2021	24 Februari 2021
6	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepseskab Nomor 14 Tahun 2021	10 Maret 2021
7	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 15 Tahun 2021	23 Maret 2021
8	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Wakil Presiden	Kepseskab Nomor 17 Tahun 2021	6 April 2021
9	Keputusan Sekretariat Kabinet tentang Pemberhentian Penugasan Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Pembangunan Keuangan dan Daerah pada Sekretariat Kabinet	Kepseskab Nomor 18 Tahun 2021	6 April 2021

10	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepreskabs Nomor 19 Tahun 2021	6 April 2021
11	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepreskabs Nomor 23 Tahun 2021	21 April 2021
12	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Wakil Presiden	Kepreskabs Nomor 24 Tahun 2021	22 April 2021
13	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepreskabs Nomor 25 Tahun 2021	28 April 2021
14	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepreskabs Nomor 27 Tahun 2021	11 Mei 2021
15	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Asisten Staf Khusus Presiden	Kepreskabs Nomor 28 Tahun 2021	11 Mei 2021
16	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepreskabs Nomor 29 Tahun 2021	11 Mei 2021
17	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepreskabs Nomor 30 Tahun 2021	11 Mei 2021
18	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepreskabs Nomor 31 Tahun 2021	20 Mei 2021
19	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Penugasan PNS BPKP di lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepreskabs Nomor 33 Tahun 2021	3 Juni 2021
20	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepreskabs Nomor 34 Tahun 2021	2 Juli 2021
21	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Asisten Staf Khusus Presiden	Kepreskabs Nomor 35 Tahun 2021	2 Juli 2021

22	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 37 Tahun 2021	28 Juli 2021
23	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 38 Tahun 2021	16 Agustus 2021
24	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepseskab Nomor 39 Tahun 2021	27 Agustus 2021
25	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepseskab Nomor 40 Tahun 2021	21 September 2021
26	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepseskab Nomor 41 Tahun 2021	27 September 2021
27	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian dari Jabatan Pelaksana dan Fungsional dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepseskab Nomor 42 Tahun 2021	27 September 2021
28	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 43 Tahun 2021	27 September 2021
29	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 44 Tahun 2021	27 September 2021
30	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian dari Jabatan Pelaksana	Kepseskab Nomor 46 Tahun 2021	26 Oktober 2021
31	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 48 Tahun 2021	8 November 2021
32	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian dari Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Kepseskab Nomor 49 Tahun 2021	24 November 2021

33	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 50 Tahun 2021	24 November 2021
34	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 51 Tahun 2021	24 November 2021
35	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 52 Tahun 2021	24 November 2021
36	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 54 Tahun 2021	3 Desember 2021
37	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	Kepseskab Nomor 57 Tahun 2021	31 Desember 2021

Lampiran 6: Penyelenggaraan Program Pengembangan Kapasitas Pegawai

NO.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1	<i>Workshop Digital Transformation in Government, Economy, and Society in Asia</i>	4	17 s.d. 27 Januari 2022	Zoom
2	Workshop Implementasi SPSE Ver 4.5	5	23 s.d. 24 Februari 2022	Hotel Sunlake Sunter
3	<i>Legislative Drafting</i>	25	24, 25 Februari (online) 1 Maret (offline)	Online: Zoom Offline: Gd. Sarinah
4	Comptia A+	5	24, 26 Februari 1,2,4 Maret	Kantor Inixindo, Permata Selatan
5	Pelatihan Simulasi Keamanan Siber <i>Smart City Focused on Cyber Physical System</i>	3	28 s.d. 30 Maret 2022	Kantor Puser Pengembangan Sumber Daya BSSN
6	Pelatihan Pembelajaran Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)	20	21 Maret s.d. 18 Juli 2022 8 s.d. 22 April 2022	Zoom
7	<i>Critical Thinking</i>	20	17 s.d. 18 Maret 2022	Zoom
8	<i>South-South Cooperation in Cross Border E-Commerce for Poverty Eradication and Global Sustainable Development</i>	5	21 s.d. 25 Maret 2022	Zoom
9	Pelatihan Mediasi	5	12 s.d. 14 April 2022	Online: Zoom Offline: Hotel Vertu Harmoni
10	Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	1	11 s.d. 13 April 2022	The Hermitage, Jakarta

NO.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
11	Pengelolaan Arsip Dinamis	7	17 s.d. 20 Mei 2022	Zoom
12	<i>Pelatihan Computer Hacking Forensic Investigator</i>	5	21 Mei s.d. 18 Juni 2022	NetCourse Training Center
13	Kata Hati " <i>Work From Heart</i> "	10	14 s.d. 15 Mei 2022	B Hotel, Denpasar, Bali
15	Seminar Jabatan Fungsional	50	6 s.d. 10 Juni 2022	Zoom
16	Soul of Speaking For STAR	7	18 s.d. 19 Juni 2022	Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta
17	<i>Certified Risk Governance Professional (CGRP) Batch 5</i>	1	19 s.d. 23 Juni 2022	Hotel Santika Bogor
18	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi Batch 4	2	19 s.d. 25 Juni 2022	Hotel Padjadjaran Bogor
19	Pelatihan IELTS <i>Preparation</i>	20	20 Juni s.d. 22 Juli 2022 Setiap Senin, Rabu, Jumat	Zoom
20	Ujian Dinas Tingkat I dan II	8	14 Juli 2022	Gedung CAT BKN, Jakarta
21	Diklat Teknis Penerjemah Lisan	2	18 s.d. 23 Juli 2022	Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta
22	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Batch 6	1	18 Juli s.d. 4 Agustus 2022	Online: Zoom Offline: Pusdiklatwas BPKP
23	<i>PC Hardware and Network Technical Support</i>	3	25 s.d. 29 Juli 2022	Kantor Inixindo Jakarta
24	<i>Certified Government Accounting Associate (CGAA)</i>	2	31 Juli s.d. 4 Agustus 2022	Hotel Padjadjaran Bogor

NO.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
25	BESTIE			
	<i>Leadership: Great Leaders, Great Influencers</i>	400	22 Agustus 2022	Zoom
	Displin dan Kerja Produktif: Sebuah Pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	354	24 Agustus 2022	Zoom
	Laras Bahasa: Penulisan Efektif dan Ragam Penggunaannya	324	26 Agustus 2022	Zoom
	Waspada Investasi	368	29 Agustus 2022	Zoom
	Respon Perkembangan Ekonomi Dunia: Studi Kasus Kawasan ASEAN	302	31 Agustus 2022	Zoom
	<i>Governance, Risk, and Compliance</i>	312	2 September 2022	Zoom
	<i>Canva Expert in One Day</i>	273	5 September 2022	Lantai 4 Gedung III Sekretariat Kabinet
	<i>Sharing Session</i> Beasiswa Luar Negeri	255	7 September 2022	Zoom
	<i>Branding and Content Creation for Government</i>	206	9 September 2022	Zoom
	<i>Protocol: Manners and Attitude "How to act as Bureaucrats"</i>	334	12 September 2022	Zoom
26	BESTIE Spin Off			
	<i>Cybers Security Awareness: Staying Safe Online</i>	227	21 September 2022	Zoom
	Bangga Buatan Indonesia #SemuanyaAdaDisini	210	10 Oktober 2022	Zoom

NO.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
27	Soul of Speaking for PRIME	8	27 s.d. 28 Agustus 2022	Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta
28	Penilaian Kompetensi	159	23 s.d. 25 Agustus 2022	Gedung CAT BKN Jakarta
29	Soul of Speaking For STAR	5	3 s.d. 4 September 2022	Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta
30	<i>Certification of Governemnt Accounting Expert (CGAE) Batch 3</i>	1	4 s.d. 8 September 2022	Hotel Santika Bogor
31	Soul of Speaking For STAR	7	10 s.d. 11 September	Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta
32	Soul of Speaking For STAR	10	17 s.d. 18 September 2022	Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta
33	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda	1	4 s.d. 13 Oktober 2022 24 Oktober s.d. 3 November 2022	Online: Zoom Offline: Pusdiklatwas BPKP
34	Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan	1	5 s.d. 7 Oktober 2022	Aston Sentul Lake Resort and Conference Center
35	Soul Of Speaking For PRIME	8	8 s.d. 9 Oktober 2022	Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta
36	<i>International Conference on Islam in the Malay World (ICON-IMAD XI)</i>	1	26 s.d. 27 Oktober 2022	Horison Hotel, Bandung
37	Penggunaan Bahasa Indonesia yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Batch I	30	19 s.d. 20 Oktober 2022	Hotel Borobudur, Jakarta
38	Penggunaan Bahasa Indonesia yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Batch II	30	24 s.d. 25 Oktober 2022	Hotel Pullman Indonesia, Jakarta

NO.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
39	Soul of Speaking For STAR	8	15 s.d. 16 Oktober 2022	Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta
40	Soul Of Speaking For PRIME	6	29 s.d. 30 Oktober 2022	Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jakarta
41	Kata Hati "Seminar Goal Praying"	16	27 Oktober s.d. 1 November 2022	Griya Persada Convention Hotel dan Resort, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah
42	Kongres XV dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia Tahun 2022	2	1 s.d. 4 November 2022	Vasa Hotel, Surabaya
43	Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK)	2	22 s.d. 24 November 2022 15 s.d. 17 November 2022	Zoom
44	Soul of Speaking for Extraordinary	15	13 s.d. 16 November 2022	Hyatt Regency, Yogyakarta
45	Pelatihan Teknis Kearsipan "Pengelolaan Arsip Dinamis"	3	16 s.d. 19 November 2022	Yogyakarta
46	Pemetaan Potensi dan Kompetensi (<i>talent pool</i>)	122	9 November 2022	Gedung CAT BKN Jakarta

Lampiran 7: Penanganan Kasus Disiplin dan Hukum Pegawai

No	Nama Kasus	Waktu Mulai Penanganan
1	Perceraian Pegawai a.n. E	Februari 2022
2	Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Non PNS a.n. Y	Maret 2022
3	Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Non PNS a.n. AE	Maret 2022
4	Pembinaan Pegawai Tidak Tetap	April 2022
5	Laporan Permasalahan Kinerja Pegawai a.n. MR	April 2022
6	Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Non PNS a.n. H	Mei 2022
7	Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik PNS a.n. G	Juli 2022
8	Laporan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik PNS a.n. DW	Agustus 2022
9	Pembinaan Pegawai Tidak Tetap	Agustus 2022
10	Perceraian Pegawai a.n R & Y	Oktober 2022

Lampiran 8: Penerbitan Peraturan Internal

NO.	JENIS PERATURAN	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
1	Peraturan Sekretaris Kabinet	Kode Etik Sekretariat Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya	Nomor 1 Tahun 2022	3 Januari 2022
2	Peraturan Sekretaris Kabinet	Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Nomor 2 Tahun 2022	4 Februari 2022
3	Peraturan Sekretaris Kabinet	Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 3 Tahun 2022	8 Februari 2022
4	Peraturan Sekretaris Kabinet	Rencana Kerja (Work Plan) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2022	Nomor 4 Tahun 2022	24 Maret 2022
5	Peraturan Sekretaris Kabinet	Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2022	Nomor 5 Tahun 2022	20 Juni 2022
6	Peraturan Sekretaris Kabinet	Peta Kebijakan Sekretariat Kabinet Tahun 2022-2024	Nomor 6 Tahun 2022	14 September 2022
7	Peraturan Sekretaris Kabinet	Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 7 Tahun 2022	22 September 2022
8	Peraturan Sekretaris Kabinet	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 8 Tahun 2022	22 September 2022
9	Peraturan Sekretaris Kabinet	Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 9 Tahun 2022	22 September 2022
10	Keputusan Sekretaris Kabinet	Sekretariat Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya	Nomor 1.1 Tahun 2022	3 Januari 2022

11	Keputusan Sekretaris Kabinet	Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penerjemah Sekretariat Kabinet	Nomor 2 Tahun 2022	14 Januari 2022
12	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penunjukan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 3 Tahun 2022	20 Januari 2022
13	Keputusan Sekretaris Kabinet	Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2022	Nomor 4 Tahun 2022	30 Januari 2022
14	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet	Nomor 7 Tahun 2022	7 Februari 2022
15	Keputusan Sekretaris Kabinet	Tim Penyusun Soal Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Formasi Jabatan Fungsional Penerjemah	Nomor 28 Tahun 2022	27 April 2022
16	Keputusan Sekretaris Kabinet	Perubahan atas Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2022	Nomor 35 Tahun 2022	20 Juni 2022
17	Keputusan Sekretaris Kabinet	Standar Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Nomor 39 Tahun 2022	25 Juli 2022
18	Keputusan Sekretaris Kabinet	Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Untuk Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet	Nomor 41 Tahun 2022	6 September 2022
19	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Kabinet	Nomor 52 Tahun 2022	6 September 2022
20	Keputusan Sekretaris Kabinet	Tim Pertimbangan Pemberian Tanda Kehormatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 53 Tahun 2022	9 September 2022

21	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet	Nomor 56 Tahun 2022	5 Oktober 2022
22	Keputusan Sekretaris Kabinet	Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 60 Tahun 2022	17 Oktober 2022
23	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penetapan Status Barang Milik Negara pada Sekretariat Kabinet	Nomor 63 Tahun 2022	2 Desember 2022
24	Keputusan Sekretaris Kabinet	Standar Operasional Prosedur Pusat Pembinaan Penerjemah	Nomor 65 Tahun 2022	22 Desember 2022
25	Peraturan Deputy Bidang Administrasi	Pengelolaan Jurnal Penerjemahan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 1 Tahun 2022	1 Oktober 2022
26	Peraturan Deputy Bidang Administrasi	Forum Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa (<i>Clearing House</i>) di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 2 Tahun 2022	20 Oktober 2022
27	Keputusan Deputy Bidang Administrasi	Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 1 Tahun 2022	3 Januari 2022
28	Keputusan Deputy Bidang Administrasi	Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Kabinet	Nomor 2 Tahun 2022	26 Januari 2022
29	Keputusan Deputy Bidang Administrasi	Sekretariat Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penerjemah Sekretariat Kabinet	Nomor 3 Tahun 2022	26 Januari 2022
30	Keputusan Deputy Bidang Administrasi	Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penerjemah	Nomor 4 Tahun 2022	26 Januari 2022
31	Keputusan Deputy Bidang Administrasi	Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 5 Tahun 2022	28 Januari 2022
32	Keputusan Deputy Bidang Administrasi	Penetapan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran	Nomor 6 Tahun 2022	2 Februari 2022

		Pembantu Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2022		
33	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Penetapan Operator, Validator, dan Approver Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat dan Unit Eselon I Sekretariat Kabinet	Nomor 7 Tahun 2022	24 Februari 2022
34	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan untuk Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet dan Staf Khusus Presiden	Nomor 8 Tahun 2022	1 Maret 2022
35	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Proyek Perubahan Strategi Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Nomor 9 Tahun 2022	6 April 2022
36	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Administrasi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP.18/ADM/IX/2021 tentang Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2022	Nomor 10 Tahun 2022	13 April 2022
37	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Kerja Penyiapan Analisis dan Pengolahan Materi Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Strategi Implementasi Pasca Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga	Nomor 10.1 Tahun 2022	14 April 2022
38	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Penambahan Peran User Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Kabinet dan Unit Eselon I Sekretariat Kabinet	Nomor 11 Tahun 2022	3 Juni 2022
39	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Perubahan User Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja dan Unit Eselon I Sekretariat Kabinet	Nomor 12 Tahun 2022	3 Juni 2022

40	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Pengawas Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2022	Nomor 13 Tahun 2022	3 Juni 2022
41	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet	Nomor 14 Tahun 2022	23 Juni 2022
42	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2022	Nomor 15 Tahun 2022	7 Juli 2022
43	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Penetapan Pengguna (User) Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1, Dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Kabinet	Nomor 16 Tahun 2022	14 Juli 2022
44	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Penerjemah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus 2022	Nomor 17 Tahun 2022	1 Agustus 2022
45	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Asesor dan Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 20 Tahun 2022	26 Agustus 2022
46	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Untuk Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet	Nomor 21 Tahun 2022	6 September 2022
47	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Evaluasi Peraturan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 22 Tahun 2022	22 September 2022
48	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Perubahan User Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja dan Unit Kerja Eselon I Sekretariat Kabinet	Nomor 23 Tahun 2022	30 September 2022

49	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Risalah sebagai Rujukan dalam Perumusan, Penetapan, dan Pengimplementasian Kebijakan Nasional	Nomor 24 Tahun 2022	18 Oktober 2022
50	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2023	Nomor 25 Tahun 2022	20 Oktober 2022
51	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden Serta Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, serta Dana Operasional Sekretaris Kabinet dan Utusan Khusus Presiden	Nomor 27 Tahun 2022	14 Desember 2022
52	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 1 Tahun 2022	4 Februari 2022
53	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 2 Tahun 2022	17 Februari 2022
54	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Penerapan Metode At Cost Dalam Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 3 Tahun 2022	31 Mei 2022
55	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Pengelolaan dan Pengendalian Peralatan dan Bahan Kebersihan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 4 Tahun 2022	21 Juni 2022
56	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Pengelolaan dan Pengendalian Security Paper di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 5 Tahun 2022	21 Juni 2022
57	Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi	Pelaksanaan Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 6 Tahun 2022	22 Juni 2022

58	Instruksi Sekretaris Kabinet	Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan	Nomor 1 Tahun 2022	Jumat, 17 Juni 2022
----	------------------------------------	---	-----------------------	------------------------

Lampiran 9: Penerbitan Keputusan Presiden (TPA)

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
1	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1 TPA	3 Januari 2022
2	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	2 TPA	3 Januari 2022
3	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	3 TPA	3 Januari 2022
4	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	4 TPA	6 Januari 2022
5	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan	5 TPA	12 Januari 2022
6	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	6 TPA	12 Januari 2022
7	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	7 TPA	8 Februari 2022
8	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	8 TPA	8 Februari 2022
9	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	9 TPA	11 Februari 2022
10	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	10 TPA	15 Februari 2022
11	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	11 TPA	17 Februari 2022

12	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia	12 TPA	17 Februari 2022
13	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	13 TPA	17 Februari 2022
14	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	14 TPA	17 Februari 2022
15	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan	15 TPA	17 Februari 2022
16	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	16 TPA	17 Februari 2022
17	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	17 TPA	17 Februari 2022
18	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	18 TPA	17 Februari 2022
19	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	19 TPA	17 Februari 2022
20	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Keamanan Laut	20 TPA	17 Februari 2022
21	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	21 TPA	17 Februari 2022
22	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	22 TPA	17 Februari 2022
23	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	23 TPA	17 Februari 2022

24	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	24 TPA	17 Februari 2022
25	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	25 TPA	21 Februari 2022
26	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	26 TPA	21 Februari 2022
27	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	27 TPA	2 Maret 2022
28	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	28 TPA	2 Maret 2022
29	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	29 TPA	4 Maret 2022
30	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	30 TPA	4 Maret 2022
31	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan	31 TPA	4 Maret 2022
32	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia	32 TPA	9 Maret 2022
33	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian	33 TPA	9 Maret 2022
34	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	34 TPA	5 April 2022
35	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	35 TPA	5 April 2022

36	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Perpustakaan Nasional	36 TPA	5 April 2022
37	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	37 TPA	6 April 2022
38	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	38 TPA	6 April 2022
39	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pertahanan	39 TPA	12 April 2022
40	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	40 TPA	18 April 2022
41	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	41 TPA	18 April 2022
42	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	42 TPA	18 April 2022
43	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	43 TPA	18 April 2022
44	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	44 TPA	18 April 2022
45	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung	45 TPA	19 April 2022
46	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	46 TPA	19 April 2022
47	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	47 TPA	19 April 2022

48	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	48 TPA	19 April 2022
49	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	49 TPA	19 April 2022
50	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	50 TPA	19 April 2022
51	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional	51 TPA	19 April 2022
52	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	52 TPA	19 April 2022
53	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	53 TPA	22 April 2022
54	Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara	54 TPA	22 April 2022
55	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	55 TPA	27 April 2022
56	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan	56 TPA	24 Mei 2022
57	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan	57 TPA	24 Mei 2022
58	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	58 TPA	31 Mei 2022
59	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	59 TPA	31 Mei 2022

60	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	60 TPA	31 Mei 2022
61	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial	61 TPA	31 Mei 2022
62	Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional	62 TPA	31 Mei 2022
63	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan	63 TPA	31 Mei 2022
64	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	64 TPA	31 Mei 2022
65	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan	65 TPA	20 Juni 2022
66	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan	66 TPA	24 Juni 2022
67	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian	67 TPA	24 Juni 2022
68	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	68 TPA	24 Juni 2022
69	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi	69 TPA	24 Juni 2022
70	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70 TPA	24 Juni 2022
71	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	71 TPA	24 Juni 2022
72	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	72 TPA	24 April 2022

73	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	73 TPA	24 Juni 2022
74	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	74 TPA	24 Juni 2022
75	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75 TPA	24 Juni 2022
76	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	76 TPA	24 Juni 2022
77	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan	77 TPA	24 Juni 2022
78	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial	78 TPA	24 Juni 2022
79	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	79 TPA	24 Juni 2022
80	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	80 TPA	24 Juni 2022
81	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	81 TPA	24 Juni 2022
82	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	82 TPA	24 Juni 2022
83	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pangan Nasional	83 TPA	24 Juni 2022
84	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial	84 TPA	24 Juni 2022

85	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Madya di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	85 TPA	24 Juni 2022
86	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	86 TPA	1 Juli 2022
87	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Inteligen Negara	87 TPA	Senin, 18 Juli 2022
88	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan	88 TPA	Senin, 18 Juli 2022
89	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	89 TPA	Senin, 18 Juli 2022
90	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	90 TPA	Selasa, 2 Agustus 2022
91	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	91 TPA	Selasa, 2 Agustus 2022
92	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	92 TPA	Selasa, 2 Agustus 2022
93	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	93 TPA	19 Agustus 2022
94	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	94 TPA	19 Agustus 2022
95	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	95 TPA	24 Agustus 2022

96	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	96 TPA	24 Agustus 2022
97	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	97 TPA	25 Agustus 2022
98	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan	98 TPA	25 Agustus 2022
99	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	99 TPA	25 Agustus 2022
100	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	100 TPA	25 Agustus 2022
101	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	101 TPA	26 Agustus 2022
102	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	102 TPA	26 Agustus 2022
103	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh	103 TPA	29 Agustus 2022
104	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh	104 TPA	29 Agustus 2022
105	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	105 TPA	14 September 2022
106	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	106 TPA	14 September 2022
107	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian	107 TPA	14 September 2022

108	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	108 TPA	14 September 2022
109	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	109 TPA	14 September 2022
110	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	110 TPA	14 September 2022
111	Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama	111 TPA	14 September 2022
112	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	112 TPA	14 September 2022
113	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	113 TPA	14 September 2022
114	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	114 TPA	14 September 2022
115	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	115 TPA	14 September 2022
116	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	116 TPA	14 September 2022
117	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	117 TPA	14 September 2022
118	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	118 TPA	14 September 2022
119	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	119 TPA	21 September 2022

120	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	120 TPA	21 September 2022
121	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	121 TPA	21 September 2022
122	Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	122 TPA	21 September 2022
123	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara	123 TPA	6 Oktober 2022
124	Pemberhentian Deputi di Lingkungan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	124 TPA	6 Oktober 2022
125	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	125 TPA	10 Oktober 2022
126	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	126 TPA	24 Oktober 2022
127	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan	127 TPA	27 Oktober 2022
128	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	128 TPA	27 Oktober 2022
129	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	129 TPA	27 Oktober 2022
130	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	130 TPA	27 Oktober 2022
131	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	131 TPA	31 Oktober 2022
132	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	132 TPA	27 Oktober 2022

133	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan	133 TPA	27 Oktober 2022
134	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Informasi Geospasial	134 TPA	2 November 2022
135	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	135 TPA	2 November 2022
136	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	136 TPA	2 November 2022
137	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional	137 TPA	2 November 2022
138	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	138 TPA	7 November 2022
139	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	139 TPA	30 November 2022
140	Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara	140 TPA	30 November 2022
141	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	141 TPA	30 November 2022
142	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	142 TPA	30 November 2022
143	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	143 TPA	30 November 2022
144	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	144 TPA	1 Desember 2022

145	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku	145 TPA	1 Desember 2022
146	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	146 TPA	1 Desember 2022
147	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	147 TPA	1 Desember 2022
148	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	148 TPA	1 Desember 2022
149	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan	149 TPA	1 Desember 2022
150	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan	150 TPA	1 Desember 2022
151	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	151 TPA	1 Desember 2022
152	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi	152 TPA	1 Desember 2022
153	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	153 TPA	1 Desember 2022
154	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	154 TPA	1 Desember 2022
155	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia	155 TPA	7 November 2022
156	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	156 TPA	1 Desember 2022

157	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan	157 TPA	1 Desember 2022
158	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum	158 TPA	1 Desember 2022
159	Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden	159 TPA	1 Desember 2022
160	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan	160 TPA	1 Desember 2022
161	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	161 TPA	6 Desember 2022
162	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	162 TPA	7 Desember 2022
163	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	163 TPA	7 Desember 2022
164	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	164 TPA	7 Desember 2022
165	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	165 TPA	15 Desember 2022
166	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	166 TPA	15 Desember 2022
167	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	167 TPA	15 Desember 2022
168	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	168 TPA	15 Desember 2022

Lampiran 10:

Formulir *Checklist* Muatan Substansi LKj Biro SDM OT Tahun 2021

No	Jenis	Pernyataan		Checklist
1	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2	LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1	LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggujawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3	Penyusunan LKj Satuan Organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	√
		4	Data informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4	Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5	Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√

		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	√